



Latar Belakang

Pembentukan negara sejahtera (welfare state) untuk menjamin adanya kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan dasar dan kepentingan nasional bagi sebagian besar negara. Dalam upaya pencapaiannya, sistem demokrasi dinilai sebagai sistem terbaik dalam pemerintahan. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan era informasi telah mendorong pola saling ketergantungan dalam hubungan antar negara dan menyebabkan ide tentang “batas negara” semakin kabur. Dalam konteks inilah, ide tentang integritas menjadi kebutuhan utama dalam praktik tata kelola pemerintahan dan korporasi bisnis yang baik dalam relasinya dengan masyarakat multikultural.

Universitas Paramadina bermaksud untuk memfasilitasi sebuah forum akademik bagi pertukaran pengetahuan dan ide-ide baru yang dapat mengelaborasi penemuan riset dan pandangan baru lebih lanjut tentang bagaimana konsep integritas dalam tiga konteks: tata kelola pemerintahan dan praktik bisnis yang serta masyarakat multi-kultural berkontribusi dalam pembentukan sebuah negara sejahtera. Pendekatan yang digunakan dalam mengelaborasi tiga tingkatan tersebut akan memperhatikan tiga aspek: 1) personal/tingkat individu, 2). Sosial/tingkat kelompok, serta 3) institusi/tingkat institusi melalui paradigm trans- dan atau inter-disipliner.

Sejak tahun 2008, Universitas Paramadina telah mewajibkan Mata Kuliah Anti-Korupsi dalam kurikulum di tingkat universitas bagi seluruh mahasiswa. Pada tahun 2010, Universitas Paramadina bekerjasama dengan PT. Gramedia menerbitkan buku berjudul “Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Proses Pemberantasan” yang merupakan kumpulan tulisan dengan editor Wijayanto dan Ridwan Zachrie. Buku tersebut merupakan upaya Universitas dalam mendokumentasi pemikiran dari berbagai aspek, baik politik, ekonomi, sejarah, filsafat, sosial budaya maupun hukum tentang praktik korupsi yang dinilai sebagai hambatan utama dalam upaya menciptakan negara sejahtera. Konferensi ini merupakan

lanjutan dari komitmen universitas dalam berkontribusi gerakan nasional anti-korupsi.

Daron Acemoglu dan James Robinson (2008) menegaskan bahwa kesuksesan atau keterpurukan (kemiskinan) ekonomi sebuah negara lebih disebabkan atas kinerja institusi politik dan ekonomi. Jelas adanya keterkaitan antara praktik korupsi dengan pembentukan negara sejahtera. Di sisi lain, gerakan anti-korupsi yang massif dan lebih berfokus pada praktik penindakan dirasa masih lemah dalam memberikan efek jera dan daya pencegahan. Dalam konteks ini, Universitas Paramadina memandang pentingnya untuk memperkuat gerakan ini dengan bergerak lebih luas di luar ide atau konsep anti-korupsi dengan mencari pendekatan lebih holistik dan komprehensif melalui penguatan ide dan penerapan konsep praktik integritas.

Tujuan Kegiatan

- Memfasilitasi ruang akademis bagi pertukaran dan produksi pengetahuan.
- Mengidentifikasi penemuan-penemuan berbasis riset terkait aspek integritas dalam subjek tematik tata kelola pemerintah yang baik, praktik bisnis dan masyarakat multi-kultural
- Memfasilitasi pengembangan ide riset baru terkait dengan topik tertentu termasuk mendorong kolaborasi atau pembentukan jaringan antar peserta.
- Mengusulkan baik pendekatan keilmuan maupun metode riset dalam memahami konsep integritas

Format Kegiatan

Hari Pertama: Rabu, 14 Desember 2016

1 Pembicara Kunci: Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI*)

2. Seminar Pembicara Utama:

- Pimpinan KPK

- Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, S.E., M.E. (Ketua KPPU)

- Asep Rahmat Fajar (Tenaga Ahli Utama Kedeputian V, Kantor Staf Presiden)

3. Seminar Panel dari Call for Paper

Panel 1: Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Convenors: Djayadi Hanan, Ph.D, Abdul Gismar Malik, PhD (*), Dina Wisnu, Ph.D(*), Prof. Dr. Tirta Mursitama(*), Dr. Farabi Fakhri(*)

Panel ini bermaksud untuk mengelaborasi tentang ide dan konsep integritas dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya gejala terdakwa praktik korupsi yang telah menjalani hukuman dan kemudian mengajukan diri sebagai dan bahkan terpilih kembali untuk menjabat posisi publik seperti kepala daerah atau anggota parlemen tentu memunculkan kegelisahan tentang efektifitas gerakan anti-korupsi. Pertanyaan yang ingin dielaborasi di panel ini adalah: 1). Apa dan bagaimana konsep integritas dipahami dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik? 2) Apakah permasalahan mendasar dalam praktik tata kelola pemerintahan terkait dengan praktik korupsi? 3). Bagaimana mendorong “moral responsibility” di tengah tuntutan perspektif pragmatis dan “transactional cost” dalam proses pengambilan keputusan dan kecenderungan kebijakan populis?, dan 4). Bagaimana konsep profesionalisme “sebaiknya” diterapkan dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik?

Adapun subjek tematik yang ingin dielaborasi panel ini adalah:

- Praktik Korupsi, Nepotisme, dan Kolusi dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan
- Pembuatan Kebijakan Publik yang Partisipatif dan Akuntabel.
- Kepemimpinan Politik
- Pelaksanaan sistem transparansi dan akuntabel melalui instrume e-governance
- Sistem demokrasi dan partisipasi publik

Panel 2: Integritas dalam Praktik Bisnis

Convenors: Dr. Iin Mayasari, Dr. Handi Risza, Dr. Iyus Wiadi; Dr. Tatok Sudiarto, QK. Dikara Barcah, ST., M.Sc., MBA (*), Agoes Joesoef, MSi

Panel ini ditujukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang ide dan konsep integritas dalam praktik bisnis. Lenturnya batasan pemberian insentif atau keistimewaan bagi dunia bisnis dengan praktik korupsi seringkali menjadi celah bagi kolaborasi pihak swasta dengan agensi pemerintah yang koruptif. Pendekatan etika bisnis, profesionalisme atau transparansi dinilai masih minim menciptakan praktik bisnis yang adil bagi masyarakat di tengah kuatnya arus pasar dengan kekuatan liberalism dan neo-liberalisme di satu sisi, dan berkembang pesatnya industri kreatif yang membutuhkan ruang kreasi lebih luas. Panel mencoba menjawab : 1). Apa dan bagaimana konsep integritas dipahami dalam praktik bisnis yang baik, 2). Apakah permasalahan mendasar dalam praktik bisnis dengan praktik korupsi, 3). Bagaimana konsep ekonomi nasional Indonesia di tengah derasnya ideologi pasar bebas dan pertumbuhan inovasi dalam industri kreatif? 4). Bagaimana mendorong “moral-sosial responsibility” bagi perekonomian yang adil di tengah tuntutan perspektif pragmatis dan akumulasi profit dalam praktik bisnis? 5). Bagaimana konsep profesionalisme “sebaiknya” diterapkan dalam praktik bisnis yang baik?

Adapun tema yang diharapkan untuk dielaborasi lebih lanjut adalah:

- Kompetisi Bisnis
- Kejahatan Bisnis: Pencucian Uang, Kejahatan berbasis internet (cyber crime)
- Praktik Komersial internet (e-commerce)
- Kebijakan Bisnis
- Bisnis/Industri Kreatif

Panel 3: Integritas dalam Masyarakat Multikultural

Convenors: Totok A. Soefijanto Ed.D, Dr. Dr. Fatchiah E. Kertamuda, Dr. Ayu Dwi Nindyati, M.Si, Psi(*), Pipip Ahmad Rifai, PhD, Dr. Eka Wenats Wuryanta.

Panel ini diharapkan memberi ruang bagi elaborasi lebih lanjut terhadap fenomena dalam masyarakat multi-kultural yang sarat dengan wacana konflik serta aksi kekerasan yang dinilai akan menjadi lahan subur dan menjadi tidak peduli bagi praktik korupsi yang menggurita. Padahal di sisi lain, praktik korupsi merupakan gejala dari adanya rasa ketidakadilan dan ketidakamanan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, eksplorasi ide dan konsep integritas diharapkan mampu menjadi metode pendekatan dalam fenomena yang berkembang dalam masyarakat yang multicultural. Adapun pertanyaan yang coba untuk dijawab 1) Apa dan bagaimana konsep integritas dipahami dalam tatanan masyarakat multi-kultural? 2) Apakah permasalahan mendasar yang mendorong masyarakat menjadi toleran bahkan cenderung permissive terhadap praktik korupsi? 3). Bagaimana konsep “moral responsibility” diletakan dalam euphoria tentang kebebasan berekspresi di tengah masyarakat multi-kultural dan demokratisasi? 4) Bagaimana institusi pendidikan “sebaiknya” berperan dalam toleransi dan

harmonisasi relasi dalam masyarakat multi-kultural?, dan 5) Bagaimana perspektif agama mendorong toleransi dan harmonisasi relasi dalam masyarakat multi-kultural? Adapun tema yang dielaborasi lebih lanjut adalah:

- Komunitas berbasis internet (e-community/netizen)
- Pendidikan Berkarakter
- Literasi Media
- Perkataan yang mengandung kebencian (hate speech)
- Krisis identitas
- Radikalisasi dan Aksi Kekerasaan
- Politisasi dan komersialisasi Agama

Panel 4: Tema Panel 1-3 untuk Mahasiswa Tingkat Sarjana dan Paska Sarjana

Convenors: Dr. Prima Naomi; Fuad Mahbub Siraj, PhD, Asriana Issa Sofia, MA(*); Handrix C.Hariyanto, MA ; Haris Nur Allan Lasido, MA; Yusuf Kurniadi, M.Ds, Retno Hendrowati, ST., MT; Gilang Cempaka, MSn

Hari Kedua: Kamis, 15 Desember 2016

Kunjungan dan Audensi ke KPK dan KPPU (kegiatan pilihan)

Tanggal Penting

Batas Akhir Penerimaan Abstrak: 7 Oktober 2016

Pengumuman Seleksi Abstrak: 19-21 Oktober 2016

Batas Akhir Penerimaan Makalah: 19 November 2016

Konferensi: Rabu, 14 Desember 2016

Kunjungan ke KPK dan KPPU: 15 Desember 2016

Panduan untuk “Call for Paper”

1. Proposal paper bisa diajukan oleh individu atau grup (lebih dari satu orang namun tidak lebih dari 3 orang).

2. Abstrak terdiri dari maximum 250 kata (Tidak termasuk judul serta informasi penulis (nama, institusi , serta elamat email dan nomor kontak). Dikirimkan melalui email: prd.integritas2016@paramadina.ac.id

3. Makalah akhir terdiri dari sekitar 5000 – 10.000 kata. Jenis dan ukuran huruf: Times New Roman (12). Spasi: 1. Margin kanan dan atas: 3 cm. Margin kiri dan bawah: 4 cm.

4. Penulisan referensi menggunakan sistem endnotes (sistem APSA: American Political Science Association)

Biaya Registrasi

1. Pemakalah: Rp. 350.000
2. Pemakalah Mahasiswa : Rp. 100.000
3. Umum Gratis dengan Registrasi

Kontak Panitia

Shiskha Prabawaningtyas (08111103426)

Suratno (0878.75295704)

Christiani Ajeng (081288640858)

Email: prd.integritas2016@paramadina.ac.id